KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi V: segera bangun jalur DDT Bekasi-Cikarang, dananya sudah ada
Tanggal : Sabtu, 23 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dananya Sudah Ada

Komisi V: Segera Bangun Jalur DDT Bekasi-Cikarang



FOTO: WEB PKB

Syaiful Huda

SENAYAN meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Apil Indonesia (KAI) mempercepat proyek Double-Double Track (DDT) dari Stasiun Bekasi ke Stasiun Cikarang, Jawa Barat. Proyek diyakini bisa meminimalisir kecelakaan kereta api.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengatakan, percepatan proyek itu menyusul insiden kecelakaan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dana untuk membenahi jalur kereta.

"Enggak boleh lagi ada isu enggak ada anggaran. Pak Presiden sudah ngasih Rp 7 triliun khusus jalur kereta Jabodetabek untuk memisahkan jalur itu (kareta jarak jauh dan KRL)," ujar Huda di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Diketahui, saat ini jalur *Double-Double Track* (DDT) baru membentang dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi. Jalur ini memisahkan jalur KRL dengan kereta jarak jauh dan logistik agar perjalanannya tidak saling mengganggu.

Huda melanjutkan, pembangunan proyek DDT sepanjang 17 kilometer itu tidak perlu harus menunggu rekomendasi hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur.

Karena dijalur Bekasi hingga Cikarang memang perlu pemisahan antara jalur cepat dalam kota, luar kota dengan jalur kereta api dalam kota. "Itu sudah kesimpulan hasil rapat antara Pemerintah dan DPR," tegas politikus PKB ini.

Selain itu, Huda meminta PT KAI membangun pusat data agar seluruh data persinyalan dapat terintegrasi. Selama ini tidak ada sistem yang berfungsi untuk *back up* seluruh persinyalan, sehingga hanya ada satu sistem persinyalan. "Satu sistem persinyalan itu, begitu *error*, akhirnya *error* semuanya," tandasnya.

Huda juga meminta Pemerintah Pusat (Pempus) untuk mengambil alih pekerjaan perlintasan sebidang. Karena perlintasan sebidang sebenarnya tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot), Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan Pemerintah Provinsi (pemprov). "Jadi perlintasan sebidang itu memang mandatnya tidak di PT KAI," tegasnya.

Kendati begitu, Huda mengajak semua pihak agar tidak lagi memperdebatkan hal tersebut. Karena Pemerintah Daerah (Pemda) belum tentu mempunyai dana untuk membenahi semua perlintasan sebidang. Apalagi tantangannya untuk membangun perlintasan sebidang berat karena ada 3.700 perlintasan sebidang seluruh Indonesia dan se-Jawa hampir 2.500. "Saya mendorong semua diambil Kemenhub," desak dia. ■ TIF